



## **Representasi Kritik Sosial Lagu “Bayar-bayar-bayar” Karya Sukatani: Analisis Wacana Kritis**

**Febri Hermawan<sup>1</sup>, Angga Trio Sanjaya<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sastra Indonesia, Sastra Budaya & Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55191,  
[Febrihermawan0202@gmail.com](mailto:Febrihermawan0202@gmail.com)<sup>1</sup>, [angga.sanjaya@idlitera.uad.ac.id](mailto:angga.sanjaya@idlitera.uad.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

This study examines how the lyrics of the song “Bayar-bayar-bayar” by the punk band Sukatani represent social criticism; the song became a phenomenon because its lyrics explicitly highlight the practice of illegal levies by law enforcement officials. The research focuses on how law enforcement officials are represented, how power relations are constructed discursively, and how the song functions as a counter-discourse to the dominant discourse. The method used is descriptive qualitative analysis employing Norman Fairclough’s critical discourse analysis model, which encompasses three dimensions: text analysis, discursive practices, and sociocultural practices. The analysis is enriched by Jacques Rancière’s perspective on the “distribution of the sensible” to uncover the political dimensions within the lyrics. The study reveals three main findings. First, at the textual level, the repetition of the phrase “pay the police” and the parallel sentence structure function not only as stylistic devices but also as discursive strategies to dismantle the normalization of corruption within the bureaucracy. Second, in terms of discursive practices, this song undergoes complex dynamics of production, distribution, and consumption, transforming from a work of art into a symbol of resistance during demonstrations, and ultimately becoming the subject of legal controversy. Third, in the sociocultural sphere, this song acts as a sensory intervention that reconfigures the way society perceives injustice, while simultaneously dismantling the sensory divisions that normalize transactional practices in public services.

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Sukatani*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji representasi kritik sosial dalam lirik lagu “Bayar-bayar-bayar” karya band punk Sukatani, yang menjadi fenomena karena liriknya yang secara eksplisit menyoroti praktik pungutan liar yang melibatkan aparat. Masalah penelitian berfokus pada bagaimana aparat direpresentasikan, bagaimana relasi kuasa dibangun secara diskursif, serta bagaimana lagu tersebut berfungsi sebagai wacana tandingan terhadap wacana dominan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi: analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosio-kultural. Analisis diperkaya dengan perspektif Jacques Rancière tentang distribution of the sensible untuk mengungkap dimensi politis dalam lirik. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pada dimensi teks, repetisi frasa “bayar polisi” dan struktur paralel kalimat tidak hanya berfungsi sebagai gaya bahasa, tetapi juga sebagai strategi wacana untuk membongkar normalisasi korupsi dalam birokrasi. Kedua, pada praktik wacana, lagu ini mengalami dinamika produksi, distribusi, dan konsumsi yang kompleks, bertransformasi dari karya seni menjadi simbol perlawanan dalam aksi demonstrasi, hingga objek kontroversi hukum. Ketiga, pada praktik sosio-kultural, lagu ini berperan sebagai intervensi sensoris yang merekonfigurasi cara

masyarakat merasakan ketidakadilan, sekaligus membongkar pembagian sensoris yang menormalisasikan praktik transaksional dalam pelayanan publik.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, Sukatani

## **Pendahuluan**

Dalam rutinitas masyarakat di Indonesia, aparat kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum serta membangun ketenteraman (Hasibuan & SH, 2021). Dilansir pada situs resmi Polri, menurut Rahman & Claretta (2025) Polri yang berasal dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat, memang harus berinisiatif serta bertindak sebagai pelayan sekaligus pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam perkembangan sosial di masyarakat, kita sering menjumpai perilaku-perilaku dari pihak kepolisian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Rahman & Claretta, 2025).

Menurut Setiyono (2016) masyarakat umum memandang polisi sebagai alat kekuasaan yang melaksanakan perintah tanpa mempertimbangkan dengan cermat, sehingga sering dikaitkan dengan perilaku yang menindas. Ditambah lagi aspek profesionalitas juga menarik perhatian yang signifikan dari masyarakat umum. Administratif yang rumit dan membingungkan, yang bahkan telah sampai pada normalisasi pungutan liar untuk mempercepat proses, telah membentuk cara masyarakat memandang mereka yang memegang kekuasaan (Rahman & Claretta, 2025). Dalam hal ini musik bisa berperan sebagai medium untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat yang sering terjadi belakangan ini.

Dalam lanskap budaya populer di Indonesia, musik telah menjadi salah satu sarana alternatif yang sangat digemari oleh publik, baik sebagai sarana hiburan maupun sekadar untuk dinikmati. Tak jarang pula musik menjadi panggung atau ruang bagi musisi-musisi untuk menyuarakan keresahan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, musik tidak sekadar bertindak sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkritik sosial, menyuarakan perlawanan, serta mencerminkan ekspresi pribadi, di mana elemen emosional atau perasaan menjadi pusat perhatian utama (Maliki et al, 2025). Salah satunya adalah genre musik punk.

Musik punk secara luas dipahami sebagai medium ekspresi untuk menyuarakan keluhan, sering digunakan untuk mengekspresikan penolakan terhadap masalah sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan (Haris et al, 2025). Di Indonesia menurut Haris et al, (2025) genre ini telah tumbuh sebagai wadah bagi para musisi untuk menyoroti berbagai masalah sosial dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti band Sukatani, belakangan Band Punk asal Purbalingga ini mendapat banyak sorotan atas lagunya yang fenomenal. Fenomena lagu “Bayar-bayar-bayar” dari band Sukatani muncul bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai sebuah gejala sosial bahasa yang patut dikritisi.

Lagu ini adalah representasi terhadap wacana teks yang ditulis oleh Sukatani dalam menyoroti penolakan terhadap pungutan liar atau pembayaran paksa yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak jujur. Lagu ini menggunakan lirik yang

repetitif dan penuh sindiran yang menyoroti transformasi layanan publik esensial, seperti pengurusan izin, pelaporan barang hilang, dan proses hukum, yang menjadi pusat transaksi ilegal.

Meskipun memiliki daya tarik yang kuat, fenomena semacam ini sering kali hanya dibaca sebagai ekspresi kemarahan spontan atau protes kultural belaka. Pembacaan semacam ini mengabaikan kompleksitas wacana dan dimensi politis-filosofis yang dikandungnya. Wacana bukan sekadar kata-kata atau teks. Wacana adalah bentuk praktik sosial yang memiliki hubungan dialektis dengan masyarakat (Fairclough, 1989). Hal ini juga sejalan dengan pandangannya Foucault, dalam Eriyanto (2001), menurutnya wacana tidak hanya terbatas pada dimensi linguistik, melainkan juga berhubungan dengan tindakan sosial, menyembunyikan gagasan, cara pandang, serta ideologi. Wacana tidak hanya terdiri dari elemen sintaksis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri. Dengan demikian, wacana dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang mengandung unsur ideologi, baik dalam media lisan maupun tulisan (Haryatmoko, 2016).

Menurut Fairclough, Analisis Wacana Kritis melihat wacana bukan hanya sebagai bentuk penggunaan bahasa, tetapi juga sebagai suatu tindakan sosial yang berkaitan dengan konteks yang lebih luas seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Eriyanto, 2001). Dalam pandangan Analisis Wacana Kritis, wacana dianggap sebagai suatu jenis tindakan yang dapat memengaruhi, membentuk, dan mengubah kondisi sosial (Van Dijk, 2015). Fairclough juga menekankan pentingnya penyelidikan mengenai bagaimana wacana merefleksikan dan menguatkan ketidakadilan sosial (Purba, dkk, 2024).

Menurut Fairclough analisis wacana kritis, bahasa dan teks dianalisis menggunakan tiga dimensi utama, yaitu 1) dimensi teks; 2) praktik diskursus, dan; 3) praktik sosio-kultural (Samsuri et al, 2022). Menurut Mudiawati et al (2023) dimensi teks berfokus pada pengkajian bahasa yang digunakan dalam suatu tulisan atau catatan tertentu. Pengkajian terhadap struktur dan pesan yang dimaksud, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, termasuk ke dalam analisis teks (Fransisca et al, 2023). Praktik diskursus berfokus pada analisis cara teks dan bahasa membangun serta menggambarkan diskursus yang spesifik (Mudiawati et al, 2023). Menurut Sasmitha (2023) menganalisis konteks sosial dan budaya yang membentuk perkembangan teks merupakan bagian penting dari praktik diskursus. Praktik sosio-kultural menekankan pada analisis bagaimana bahasa beroperasi dalam berbagai aktivitas sosial di dalam suatu masyarakat (Mudiawati et al, 2023). Menurut Mudiawati et al (2023) praktik ini melibatkan analisis atas pengaruh serta konsekuensi dari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan kekuasaan yang mendasarinya. Muttaqin & Sriyono (2021) dalam penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa kegiatan sosio-kultural bisa membentuk berbagai pandangan yang muncul di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal ini, Fairclough memberikan ruang disposisi terhadap agen untuk melakukan perlawanan. Hal ini sejalan dengan perpektif Ranciere yang meletakkan subjek sebagai bagian perlawanan melalui tindakan politis di hadapan the distribution of the sensibel.

Selain itu, dalam hal ini peneliti juga memadukan pandangan politik Jacques Ranciere. Jacques Ranciere menawarkan konsep *the distribution of the sensible* yaitu pembagian yang sensibel untuk memahami cara tatanan masyarakat menentukan apa yang dapat dilihat, didengar dan diungkapkan, serta oleh siapa (Ranciere, 2010). Bagi Ranciere (2010), “politik” yang sebenarnya muncul ketika individu yang diabaikan dalam sistem yang ada *the part of those who have no part* yaitu bagian dari mereka yang tidak memiliki tempat; bangkit dan mengklaim hak mereka untuk didengarkan, sehingga mengganggu keteraturan yang mapan. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep Ranciere untuk menganalisis cara di mana lirik lagu tersebut memberikan ruang bagi individu-individu di pinggiran masyarakat dan mengajukan pandangan yang bertentangan dengan sistem yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji representasi kritik sosial lagu “bayar-bayar-bayar” karya Sukatani dengan menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough. Belum ada penelitian yang mengkaji hal tersebut dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Karena penelitian analisis wacana kritis terkait musik di Indonesia masih sangat terbatas. Meskipun demikian, ada dua penelitian yang peneliti temukan mengulas tentang lagu “bayar-bayar-bayar” karya Sukatani menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Van Dijk, diantaranya 1) Representasi Kondisi Sosial Dalam Musik Punk: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu “Bayar-Bayar-Bayar” oleh (Haris et al, 2025) yang menyimpulkan bahwa kehadiran kata “bayar” yang sering muncul dalam lirik lagu menyoroti sejauh mana pungutan liar telah menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa respons terhadap lagu Sukatani “bayar-bayar-bayar” mencerminkan interaksi yang kompleks antara kebebasan berekspresi dan tekanan institusional.

Kemudian Analisis Wacana Kritis Van Dijk terhadap Lirik Lagu “Bayar-Bayar-Bayar” oleh Band Sukatani (Maliki et al, 2025) penelitian ini menyimpulkan bahwa musik tersebut secara mendalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan, ketimpangan yang tertanam dalam struktur sosial, dan tindakan menentang norma-norma yang telah mapan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa lagu Sukatani yang dikenal sebagai “bayar-bayar-bayar” menggambarkan konsep keadilan yang eksklusif bagi individu yang memiliki sumber daya finansial, sementara mereka yang mengalami kemiskinan terus-menerus diwajibkan untuk “membayar” sebagai cara untuk memperoleh hak-hak dasar mereka.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Purba et al (2024) yang menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan judul Analisis Wacana Kritis Fairclough dalam Teks Iklan Sprite 2024, melalui analisis teks, praktik wacana, dan elemen sosiokultural, penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi promosi *Sprite* menggunakan kalimat-kalimat kreatif dan teknik bercerita untuk menyampaikan keyakinan dan tujuan tertentu kepada penonton. Melalui pendekatan penciptaan yang dirancang dengan cermat, kampanye promosi ini secara efektif menyampaikan pesan iklan sambil tetap konsisten dengan norma budaya Indonesia, kondisi keuangan, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian representasi kritik sosial dalam lagu “bayar-bayar-bayar” karya Sukatani ini akan dikaji menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas secara berurutan tentang bagaimana 1) representasi aparat pada dimensi teks, 2) dinamika relasi kuasa pada praktik wacana, 3) fungsi lagu sebagai wacana tandingan pada praktik sosio-kultural. Pertanyaan penting ini lah yang mengarahkan peneliti pada sasaran penelitian. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, 1) mengidentifikasi strategi bahasa kritik dalam lirik lagu pada dimensi teks, 2) menjelaskan dinamika relasi kuasa pada praktik wacana, 3) mengkaji fungsi lagu tersebut sebagai wacana tandingan pada praktik sosio-kultural.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam segala aspek. Dari sudut pandang teori, manfaat penelitian ini adalah dapat memperluas pengetahuan dalam bidang analisis wacana kritis. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi yang berguna untuk para peneliti berikutnya, khususnya yang memiliki minat terhadap analisis musik punk dalam kajian analisis wacana kritis Norman Fairclough. Temuan dari penelitian ini juga dapat membantu banyak orang untuk memahami konteks lagu tersebut terhadap kritik sosial yang menjadi wacana resistensi bagi kekuasaan.

## Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough terhadap teks lirik lagu. Metode kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2022), digunakan untuk memahami keadaan nyata di kehidupan sehari-hari, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Pendekatan deskriptif, menurut pandangan Nazir (2011), adalah suatu cara untuk menganalisa sekelompok orang, subjek, atau gagasan sebagaimana yang ada pada saat ini.

Unit analisis berupa baris lirik dan struktur bait yang diambil dari website genius.com, yang merupakan sumber sah dan dapat dipercaya, guna memastikan akurasi dan keabsahan teks yang akan dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan lanjutan teknik catat dan mengkombinasikan model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana. Peneliti mendengarkan lirik lagu dari sumber resmi dan mencatat bagian dari lirik tersebut yang memiliki kaitan langsung dengan fokus penelitian, terutama mengenai gambaran institusi pemerintah, relasi kuasa, serta kritik sosial. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi, 1) pemadatan data, dengan pemfokusan data lirik yang mengandung unsur kritik sosial dan relasi kekuasaan; 2) penyajian data, dengan mengelompokkan data berdasarkan tema dan pola kebahasaan; 3) penarikan kesimpulan, penafsiran makna wacana secara kritis (Miles et al., 2014).

Metode analisis wacana kritis menggunakan model tiga dimensi Norman Fairclough, diantaranya, 1) analisis teks, dengan tujuan mengkaji aspek kebahasaan seperti kata, struktur kalimat, dan pengulangan kata; 2) analisis praktik wacana, yang meliputi proses produksi, proses distribusi dan proses konsumsi lagu tersebut dalam konteks budaya populer; 3) analisis praktik sosio-kultural, untuk melihat hubungan wacana dengan struktur sosial dan kekuasaan. Kemudian terkait analisis ideologi pada praktik sosio-kultural peneliti menggabungkan konsep pemikiran dari Jacques Ranciere, khususnya

tentang *distribution of the sensible*, hubungan relasi antara *polisi* dan *politik*, serta disensus. Peneliti menggunakan pemikiran Ranciere guna mengungkap bagaimana lirik lagu tersebut membangun posisi subjek yang termarginalkan dan menghadirkan wacana tandingan pada tatanan dominan.

## Hasil dan Pembahasan

Lagu “Bayar-bayar-bayar” oleh Sukatani merupakan sebuah fenomena dalam analisis wacana karena secara langsung mengintervensi realitas sosial. Lagu ini tidak dimaksudkan untuk dinikmati dalam cara yang pasif, melainkan untuk memperkuat solidaritas, mengakui pengalaman, dan memotivasi tindakan. Dalam konteksnya, lagu ini berfungsi sebagai semacam “*soundtrack*” bagi pengalaman bersama masyarakat urban kelas bawah dan sering berkonfrontasi dengan aparat. Lagu ini menegaskan bahwa pengalaman korupsi yang dialami secara individu adalah sebuah isu yang bersifat sistemik dan kolektif. Lagu ini juga tidak hanya mencerminkan kenyataan, tetapi aktif dalam menciptakan sebuah realitas sosial alternatif mengenai polisi dan negara. Lagu “Bayar-bayar-bayar” oleh Sukatani berperan sebagai perlawanan terhadap wacana dominan mengenai otoritas. Berikut analisis teks yang bertujuan mengkaji aspek kebahasaan seperti kata, struktur kalimat, dan pengulangan kata.

### 1. Dimensi Teks

Dalam dimensi teks terdapat 13 unit lirik lagu “bayar-bayar-bayar” karya Sukatani, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Lirik lagu “bayar-bayar-bayar”

| Kode Data | Temuan Data (Lirik)                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| LG/BBB/1  | “Mau bikin SIM, bayar polisi”                            |
| LG/BBB/2  | “Ketilang di jalan, bayar polisi”                        |
| LG/BBB/3  | “Touring motor gede, bayar polisi”                       |
| LG/BBB/4  | “Angkot mau ngetem, bayar polisi”                        |
| LG/BBB/5  | “Aduh, aduh, ku tak punya uang/ Untuk bisa bayar polisi” |
| LG/BBB/6  | “Mau bikin gigs, bayar polisi”                           |
| LG/BBB/7  | “Lapor barang hilang, bayar polisi”                      |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| LG/BBB/8  | “Masuk ke penjara, bayar polisi” |
| LG/BBB/9  | “Keluar penjara, bayar polisi”   |
| LG/BBB/10 | “Mau korupsi, bayar polisi”      |
| LG/BBB/11 | “Mau gusur rumah, bayar polisi”  |
| LG/BBB/12 | “Mau babat hutan, bayar polisi”  |
| LG/BBB/13 | “Mau jadi polisi, bayar polisi”  |

Dalam analisis dimensi teks, 13 bait lirik lagu “bayar-bayar-bayar” memiliki pola bahasa yang konsisten dan bermuatan kritik sosial, berikut penjelasannya.

### 1.1.Leksikal

Pada bagian ini, data menunjukkan repetisi frasa “bayar polisi” sebanyak 13 kali dalam lagu tersebut, dengan pola yang hampir mirip pada setiap bait. Kata “mau” hampir seluruhnya muncul sebagai pembuka pada bait-bait tersebut, kemudian menciptakan struktur harapan yang selalu berakhir pada kenyataan transaksional. Selanjutnya interjeksi “aduh-aduh” dalam refrain berfungsi sebagai penanda yang menjembatani antara dimensi kognitif dan afektif.

Temuan diatas menginterpretasikan metode wacana yang kompleks dalam mengungkap normalisasi praktik korupsi. Repetisi “bayar polisi” tidak hanya berfungsi sebagai gaya penulisan, melainkan metode yang digunakan secara cermat dengan pengulangan frasa secara berlebihan guna menimbulkan kelelahan semantik. Hal ini merujuk pada keadaan di mana pendengar merasa kewalahan oleh pengulangan yang konstan, namun justru saat kelelahan ini terjadi, kritik menjadi sangat kuat.

### 1.2.Gramatikal

Pada tataran gramatikal, konstruksi kalimat menunjukkan pola paralel yang disengaja, [frasa verbal + “bayar polisi”]. Pola ini tidak hanya menciptakan ritme yang menarik, tetapi juga menyusun alasan yang jelas dan ringkas tentang konsekuensi sebab-akibat. Kalimat seluruhnya menggunakan modus deklaratif yang menyajikan pernyataan sebagai fakta, kemudian disajikan sedemikian rupa sehingga tampak seperti sesuatu yang tidak dapat dibantah.

Mengacu pada perspektif Fairclough, pola gramatikal yang ditemukan merupakan cerminan linguistik dari struktur birokrasi. Lirik lagu tersebut layaknya proses birokrasi yang kaku dan tak berubah, menggambarkan suasana distopia dan

mengganggu di mana semua interaksi sosial dipaksa mengikuti rutinitas pembayaran yang sama. Ini merupakan contoh satire institusional yang disampaikan melalui bahasa. Bagian ini memperdalam temuan pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Haris et al (2025) tidak sampai pada temuan ini karena pendekatan yang digunakan yaitu Van Dijk lebih berfokus pada makro-tematik dan kognisi sosial, bukan pada struktur gramatikal secara mendetail.

### **1.3.Representasi**

Dari sisi representasi, menunjukkan bahwa aktor “polisi” selalu muncul dalam posisi gramatikal sebagai objek dari kata kerja “bayar”. Pengaturan gramatikal ini secara linguistik menempatkan institusi tersebut ke dalam posisi penerima pasif. Namun, dalam praktiknya justru menegaskan peran aktifnya sebagai peminta. Sementara itu, subjek pelaku (rakyat) direpresentasikan melalui kata ganti “ku” yang impersonal, mewakili entitas kolektif yang terpinggirkan.

Representasi polisi sebagai objek gramatikal dalam lirik tersebut harus diinterpretasikan sebagai upaya untuk menggulingkan peran subjek. Dalam wacana resmi negara, polisi secara konsisten muncul sebagai subjek aktif yang melakukan tindakan, seperti “polisi menjaga ketertiban” atau “polisi memberikan perlindungan.” Sukatani membalikkan relasi ini dengan menggambarkan polisi sebagai objek keinginan masyarakat, namun dalam bentuk keinginan yang paradoksal. Bukan keinginan untuk dilayani, tetapi keinginan untuk membayar agar dapat dilayani.

### **1.4.Intertekstualitas**

Pada analisis ini, intertekstualitas menunjukkan bagaimana setiap baris merujuk pada domain sosial yang berbeda, seperti administrasi, hukum, ekonomi, bahkan lingkungan dan disimpulkan oleh benang merah yang sama, yaitu monetisasi hubungan antara negara dan masyarakat.

Dari temuan tersebut terdapat hal menarik, yaitu bagaimana lirik lagu ini mengompres pembahasan yang rumit menjadi ungkapan verbal yang sederhana. Mengacu pada pandangan Fairclough yang mengatakan bahwa penyederhanaan ide-ide yang kompleks merupakan ciri khas dari wacana dominan (Eryanto, 2001). Sukatani menggunakan pendekatan yang sama, dengan tujuan yang berlawanan. Rumus [X + “bayar polisi”] berfungsi sebagai penyederhanaan yang secara berlawanan mengungkap sifat rumit dari sistem korup yang telah merambah ke semua aspek. Pada refrain “Aduh, aduh, ku tak punya uang”, merupakan contoh dari disjungsi linguistik. Setelah empat bait yang ditandai dengan struktur paralel yang repetitif dan deklaratif tersebut, kemudian muncul refrain dengan struktur linguistik yang berbeda, hal ini merupakan gambaran dari ketidakberdayaan ekonomi. Dalam konteks analisis wacana kritis, bagian ini mewakili subjektivitas yang menandakan transisi kolektif dari mendeskripsikan sistem menjadi mengungkapkan posisi di luar sistem.

Pada bait “Mau jadi polisi, bayar polisi” tidak lagi menggambarkan korupsi sebagai praktik eksternal, melainkan mengemasnya sebagai persyaratan untuk

kelangsungan sistem itu sendiri. Mengacu pada kerangka pemikiran Fairclough, ini merupakan tingkatan ketiga analisis wacana, yaitu teks tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga memberikan representasi tentang mekanisme reproduksi realitas tersebut.

## **2. Praktik Wacana**

Dimensi praktik wacana pada lagu “bayar-bayar-bayar” menunjukkan kompleksitas proses produksi, proses distribusi, dan proses komunikasi teks yang terlibat dalam pembentukan makna sosial. Data menunjukkan tiga pola utama, diantaranya.

### **2.1. Proses Produksi**

Lagu ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman sehari-hari masyarakat di Indonesia. Lirik lagu tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dengan wacana publik saat ini, mulai dari berita tentang pungutan liar hingga keluhan-keluhan informal yang terjadi di ruang-ruang publik. Dalam data tersebut terdapat 13 bait lirik yang menyinggung setidaknya delapan bidang sosial yang berbeda, masing-masing bait memiliki diskursusnya sendiri di dalam masyarakat.

Menurut Fairclough dalam Jorgensen dan Phillips (2007) bahwa tidak ada teks yang lahir dari kekosongan, dengan kata lain setiap teks selalu dipengaruhi oleh apa yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa lagu tersebut telah melakukan dialog wacana intensif dengan berbagai narasi sosial yang beredar di masyarakat. Ketika Sukatani menuliskan lirik “Mau bikin SIM, bayar polisi”, secara tidak langsung ia merujuk pada banyak kasus berita, baik itu laporan media, keluhan-keluhan masyarakat di sosial media, ataupun kasus-kasus korupsi birokrasi. Ini merupakan representasi dari interdiskursivitas, di mana berbagai jenis wacana seperti musik, jurnalisme dan aktivisme bergabung untuk menciptakan hibriditas makna.

### **2.2. Proses Distribusi**

Dalam proses distribusi lagu ini berkembang dari sebuah karya musik menjadi fenomena wacana yang terjadi di berbagai kanal. Lagu ini awalnya beredar di platform musik digital seperti *Spotify* yang kemudian menyebar ke ruang-ruang lain. Sebagaimana data dari CNN Indonesia (2025), lagu ini digunakan sebagai yel-yel dalam demonstrasi “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 lalu, menjadi meme di berbagai platform media sosial, menjadi *headline* di media berita (BBC, 2025), serta menjadi objek penyelidikan hukum (DTK, 2025).

Kita perlu melihat proses distribusi sebagai bagian dari komodifikasi wacana dalam era digital. Lagu yang awalnya merupakan produk kesenian, berubah menjadi sesuatu yang digunakan untuk tujuan politik, berita, bahkan tindakan hukum. Setiap platform tempat lagu ini disebarluaskan, seperti *Spotify*, *Youtube*, ataupun platform lainnya memiliki cara tersendiri untuk memengaruhi bagaimana setiap orang memahami lagu tersebut. Data menunjukkan bahwa wacana lagu ini bergerak secara vertikal, yaitu

dari ranah kultural (musik), ke ranah politik (demonstrasi), ke ranah hukum (penyidikan). Penyebaran wacana antar institusi ini lah kemudian teks memperoleh otoritas baru setiap kali berpindah konteks. Sebagai contoh, ketika lagu ini dinyanyikan di Patung Kuda ketika aksi massa pada Februari 2025 lalu (CNN, 2025), lagu ini bukan hanya sekadar karya seni, melainkan berubah menjadi performativitas politik.

Bagian ini menjadi temuan dan perbedaan yang signifikan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Maliki et al (2025) menggunakan pendekatan Van Dijk sehingga hanya berfokus pada teks lirik dan konteks sosial secara umum, tanpa menganalisis bagaimana teks tersebut berpindah dan bertransformasi di berbagai platform.

### **2.3. Proses Konsumsi**

Bagian ini menunjukkan adanya beberapa pembagian reaksi. Diantaranya beberapa orang menerima lagu ini sebagai representasi perlawanan oleh massa aksi (JWP, 2025), sementara di sisi lain pemerintah memandangnya sebagai potensi pelanggaran peraturan (DTK, 2025). Bahkan, sebagaimana data dari TMP (2025) menunjukkan lagu ini digunakan dalam upaya rekonsiliasi sebagai objek permintaan maaf.

Temuan tersebut dapat dimaknai setidaknya sebagai tiga bagian konsumsi yang saling bersaing, diantaranya 1) konsumsi sebagai kebebasan, yaitu massa aksi yang menyanyikan lagu sebagai ekspresi solidaritas dan perlawanan; 2) konsumsi sebagai kontrol, yaitu aparat yang mengonsumsi lagu sebagai potensi ancaman terhadap otoritas; 3) konsumsi sebagai kesepakatan, yaitu publik yang menyaksikan dinamika ini sebagai drama sosial yang memerlukan penyelesaian. Setiap bagian konsumsi ini menghasilkan makna sosial yang berbeda-beda. Dalam hal ini, jika mengacu pada perspektif Fairclough ini menjelaskan bahwa makna tidak melekat pada teks, tetapi bagaimana masyarakat mengartikannya dalam konteks sosial..

## **3. Praktik Sosio-kultural**

Pada praktik sosio-kultural terdapat tiga tingkatan realitas sosial yang saling terhubung, diantaranya.

### **3.1. Tingkat Struktur Sosial.**

Lagu ini berfungsi sebagai katalisator dalam mengekspresikan ketidakadilan sistemik. Ke-lima sumber data media berita yang peneliti kumpulkan mendetailkan transformasi lagu tersebut menjadi fenomena sosial yang multidimensi, yang berkembang dari ekspresi artistik menjadi simbol gerakan, objek kontroversi hukum, hingga subjek rekonsiliasi nasional.

Namun, temuan tersebut tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, lagu Sukatani berfungsi sebagai alat untuk mendiagnosis masalah sosial sekaligus sebagai strategi perlawanan.

Setiap kalimat “Mau X, bayar polisi” merupakan sebuah kritik langsung terhadap sistem yang telah menjadikan semua aspek kehidupan publik sebagai semacam barang dagangan.

Data KMP (2025) dan JWP (2025) memperlihatkan pergeseran dari kritik menjadi tindakan nyata. Ketika ribuan orang berkumpul dan menyanyikan lagu bersama di Patung Kuda dan Surabaya, terjadi perwujudan wacana, kata-kata berubah menjadi aksi kolektif. Hal ini membenarkan teori Fairclough bahwa perubahan sosial sering kali dimulai dengan perubahan dalam cara kita berbicara tentang kenyataan.

### **3.2.Tingkat Relasi Kuasa**

Terdapat pola siklus hegemonik yang terdiri dari empat tahap, yaitu 1) tahap produksi wacana tandingan; 2) tahap mobilisasi massa; 3) reaksi pemerintah yang represif; 4) tahap negosiasi simbolik. Data dari TMP (2025) khususnya menunjukkan tahap ke-empat di mana tekanan struktural memaksa pergeseran wacana dari perlawanan menjadi permintaan maaf.

Respons institusional terhadap lagu ini sebagaimana dalam sumber data DTK, (2025) dan TMP, (2025) merepresentasikan konsep Gramsci tentang hegemoni yang diadopsi oleh Fairclough. Polisi tidak serta merta menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan metode yang lebih halus untuk mengendalikan narasi, yaitu 1) pemanggilan untuk klarifikasi; 2) pernyataan “tidak antikritik” sambil tetap melakukan pemanggilan; 3) memaksa permintaan maaf kepada publik. Namun, data juga menunjukkan bahwa hegemoni tidak pernah total. Massa aksi yang menyanyikan lagu tersebut sebagaimana dalam data JWP, (2025) membuktikan adanya ruang otonom di mana wacana tandingan tetap hidup.

Bagian ini memiliki konsistensi terhadap pola dasar relasi kuasa dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mudiawati et al (2023) terdapat kelompok subordinat yang juga merasa dirugikan oleh kebijakan atau praktik kekuasaan, mereka melakukan perlawanan melalui wacana, kekuasaan merespons dengan berbagai cara, dari negosiasi hingga represi. Dan terjadi perubahan, baik dalam kebijakan maupun dalam kesadaran publik.

### **3.3.Tingkat Perubahan Sosial**

Pada bagian ini, terdapat perubahan susunan dalam ruang publik digital yang dipicu oleh lagu tersebut. Platform seperti *Spotify* dan media sosial lainnya tidak hanya berfungsi sebagai metode distribusi, tetapi juga menjadi tempat perselisihan argumen di mana seniman, aktivis, aparat, dan pengguna internet lainnya berkompetisi untuk memperebutkan makna dan legitimasi.

Platform digital juga telah mengubah fenomena wacana ini secara tidak langsung. Lagu yang sebelumnya hanya beredar terbatas pada beberapa kelompok saja, kini dengan cepat menjadi fenomena nasional dalam beberapa waktu. Namun hal ini bersifat paradoks, sebab di satu sisi memberi suara pada yang tak terdengar, sedangkan

di sisi lain memicu respons kontrol yang lebih sistematis. Data BBC, (2025) menyoroti aspek global, merepresentasikan situasi ini sebagai bagian dari masalah kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, wacana lokal terhubung dengan jaringan wacana global, yang mengakibatkan dinamika kekuasaan menjadi lebih kompleks.

### **3.4.Distribusi Sensoris**

Pada bagian ini analisis yang digunakan mengkombinasikan konsep yang diusung oleh Jacques Ranciere yaitu bagaimana lagu tersebut berfungsi sebagai tindakan sosio-kultural yang secara bersamaan membentuk ulang *distribution of the sensible* dalam masyarakat. Terdapat tiga pembahasan utama, diantaranya.

Pertama lagu ini mengubah pemahaman tentang realitas korupsi. Data LG/BBB/1 hingga LG/BBB/13 mengungkap bagaimana pengalaman masyarakat sehari-hari seperti pembuatan SIM (LG/BBB/1) sampai penggusuran rumah (LG/BBB/11) dihimpun menjadi narasi yang koheren. Kemudian terdapat kategorisasi terpisah, seperti hukum, ekonomi, dan lingkungan yang dihubungkan kembali oleh tatanan sosial yang dominan sebagai gejala monetisasi oleh warga kepada negara.

Selanjutnya, terdapat perjuangan oleh masyarakat yang terlihat dan terdengar. Data berita dari media yang peneliti kumpulkan seperti BBC (2025), CNN (2025), dan JWP (2025) menunjukkan perubahan lagu tersebut dari objek pendengaran privat menjadi fenomena publik yang harus dilihat dan didengar. Contohnya adalah demonstrasi yang terjadi di Patung Kuda, sebagaimana dalam data CNN (2025) menunjukkan klaim kolektif atas ruang publik yang terjadi seakan mengatakan “Ini adalah suara kami, dan kami menuntutnya untuk didengar.”

Ketiga, terkait pengungkapan identitas. Data dari TMP (2025) yang menyoroti tentang permintaan maaf oleh Sukatani adalah gejala yang paradoks. Dengan dalih untuk memastikan pendapat mereka diakui (melalui musik), mereka harus memperlihatkan wajah (tanpa topeng) dalam permintaan maafnya. Ini merupakan pertukaran yang mengacu pada gagasan ranciere bahwa distribusi yang terjadi selalu melibatkan negosiasi tentang siapa yang berhak terlihat dan berbicara. Situasi ini mencerminkan dilema, sebab dalam tatanan yang ada, hak untuk terlihat dan hak untuk didengar seringkali saling tumpang tindih. Sukatani terpaksa memilih antara menjadi suara tanpa tubuh atau individu tanpa suara.

### **Simpulan**

Penelitian ini menjawab tiga tujuan utama yang telah dirumuskan. Pertama, pada dimensi teks, representasi aparat kepolisian dalam lirik lagu “Bayar-Bayar-Bayar” dibangun melalui strategi bahasa yang kompleks. Repetisi frasa “bayar polisi” sebanyak tiga belas kali menciptakan kelelahan semantik yang memperkuat kritik terhadap normalisasi pungli, sementara pola gramatikal paralel [frasa verbal + “bayar polisi”]

berfungsi sebagai satire institusional yang mencerminkan struktur birokrasi yang kaku dan korup. Representasi polisi sebagai objek gramatikal merupakan pembalikan relasi kuasa yang disengaja—dalam wacana resmi polisi adalah subjek aktif penjaga ketertiban, namun Sukatani membalikinya dengan menggambarkan polisi sebagai objek yang harus "dibayar" agar masyarakat dapat dilayani. Intertekstualitas lagu ini juga menunjukkan bahwa kritik tidak hanya tertuju pada pungli, tetapi pada sistem korup yang telah merambah ke semua aspek kehidupan, bahkan hingga reproduksi sistem itu sendiri melalui bait "Mau jadi polisi, bayar polisi."

Kedua, pada dimensi praktik wacana, dinamika relasi kuasa berlangsung dalam tiga proses, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lagu ini diproduksi sebagai respons terhadap pengalaman sehari-hari masyarakat dan berdialog intensif dengan berbagai narasi sosial yang beredar. Dalam distribusi, lagu bertransformasi dari karya seni menjadi fenomena multidimensi yang bergerak dari ranah kultural ke politik (yel-yel demonstrasi), lalu ke hukum (objek penyelidikan), hingga rekonsiliasi (objek permintaan maaf). Dalam konsumsi, lagu dimaknai secara berbeda oleh kelompok yang berbeda: massa aksi mengonsumsinya sebagai perlawanan, aparat sebagai ancaman terhadap otoritas, dan publik sebagai drama sosial. Hal ini membuktikan bahwa makna tidak melekat pada teks, tetapi dikonstruksi berdasarkan posisi sosial dan kepentingan masing-masing kelompok.

Ketiga, pada dimensi praktik sosio-kultural yang disintesis dengan pandangan Ranciere, lagu ini berfungsi sebagai wacana tandingan yang mengganggu tatanan dominan melalui intervensi sensoris, mengubah cara masyarakat melihat dan merasakan praktik pungli sebagai sesuatu yang tidak wajar. Pola siklus hegemonik yang terdiri dari produksi wacana tandingan, mobilisasi massa, reaksi represif, dan negosiasi simbolik menunjukkan bahwa hegemoni tidak pernah total, sebagaimana dibuktikan oleh massa aksi yang tetap menyanyikan lagu ini sebagai bentuk perlawanan. Namun, permintaan maaf publik Sukatani juga mengungkap dilema struktural, dalam tatanan yang ada, mereka yang tak punya bagian harus rela memperlihatkan wajahnya agar pendapatnya didengar, terjebak dalam pilihan antara menjadi suara tanpa tubuh atau individu tanpa suara.

## REFERENSI

- BBC, News. (2025, Februari 24). Polemik lagu ‘bayar-bayar-bayar’ band sukatani – apakah ini akhir ‘pembungkaman’ kritik terhadap polisi? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8j09megy90o>
- CNN, Indonesia. (2025, Februari 21). Aksi Indonesia gelap, lagu ‘bayar-bayar-bayar’ menggema di patung kuda. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250221144720-20-1201002/aksi-indonesia-gelap-lagu-bayar-bayar-bayar-menggema-di-patung-kuda>
- Detik, jatim. (2025, Februari 23). Geger lagu bayar bayar bayar berujung band sukatani diperiksa polisi. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7791978/geger-lagu-bayar-bayar-bayar-berujung-band-sukatani-diperiksa-polisi>
- Eriyanto. (2001) Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang.

- Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman
- Fairclough, Norman. (2010). *Critical Discourse Analysis*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>. Diakses pada 9 Nov 2025.
- Fajriani. (2010). Analisis Wacana Kritis Model Dalam Berita Korupsi: Pungli di Sekolah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(6), 867-876.
- Fransisca et al. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Terjemahan Drama “Audatul Firdaus” Karya Ahmad Bakatsir (Konservatif Budaya Melalui Karya Sastra). *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 7(1), 1-23. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/an->
- Haris et al. (2025). Representasi Kondisi Sosial Dalam Musik Punk: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu “Bayar, Bayar, Bayar”. *Mesir: Journal of Management Education Social Sciences Information and Relegion*, 2(1), 194-197.
- Haryatmoko. (2016). *Analisis Wacana Kritis (Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasibuan, E., & Sh, M. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9x3eeaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Dalam+Keseharian+Bermasyarakat+Di+Indonesia,+Polisi+Menjadi+Ujung+Tombak+Dalam+Penegakan+Hukum+Dan+Menciptakan+Ketertiban.+&ots=Tmyhgrxkr&sig=W0j0eqnqaviquurcq2tec3ht\\_Ba](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9x3eeaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Dalam+Keseharian+Bermasyarakat+Di+Indonesia,+Polisi+Menjadi+Ujung+Tombak+Dalam+Penegakan+Hukum+Dan+Menciptakan+Ketertiban.+&ots=Tmyhgrxkr&sig=W0j0eqnqaviquurcq2tec3ht_Ba)
- Jorgensen & Phillips. (2007). *Analisis wacana: teori & metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliana, Christy. (2025, Februari 22). Lagu sukatani “bayar bayar bayar” bergema di aksi Indonesia gelap Surabaya, simbol perlawanan terhadap pemerintah. Jawa Pos. [https://www.jawapos.com/surabaya-raja/015675765/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-bergema-di-aksi-indonesia-gelap-surabaya-simbol-perlawanan-terhadap-kebijakan-pemerintah#google\\_vignette](https://www.jawapos.com/surabaya-raja/015675765/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-bergema-di-aksi-indonesia-gelap-surabaya-simbol-perlawanan-terhadap-kebijakan-pemerintah#google_vignette)
- Maliki et al. (2025). Analisis Wacana Kritis Van Dijk Terhadap Lirik Lagu “Bayar Bayar Bayar” oleh Band Sukatani. *Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 2(3), 27-42
- Miles, M., Huberman, A., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE
- Mudiawati et al. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739-762
- Muttaqin, M.Z., & Sriyono. (2021). Konstruksi Opini Publik melalui Media Sosial: Studi Pendekatan Analisis Wacana Kritis Grup Facebook Lintas kejadian Kota Jayapura pada Bulan Juni 2021. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 113-129. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.113->
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purba, A., Rahmadani, P., & Sari, S. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough dalam teks iklan sprite 2024. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 2185-2191 <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3158>
- Rahman & Claretta. (2025). POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEKERASAN DI MEDIA (SEBUAH ANALISIS WACANA). *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 7(3), 464-474
- Rancière, Jacques., & Corcoran, Steve. (2010). *Dissensus: On Politics and Aesthetics*. Continuum.
- Rizki, Dewi, Ayu. (2025, Februari 20). Duduk perkara grup band sukatani minta maaf ke polri. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/duduk-perkara-grup-band-sukatani-minta-maaf-ke-kapolri-1209928>
- Sasmsuri et al. (2022). Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid 19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *DIGLOSLIA Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(3), 603-618

- Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program “Somasi.” *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 44-58. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.44-58>
- Setiyono, Budi. (2016). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Bandung: Alfabeta.
- Umam & Basid. (2025). Konflik Serangan Israel ke Lebanon dalam Pemberitaan Media Arab: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Genre*, 7(1), 135-151
- Van Dijk, T. (2002). Ideology: political discourse and cognition. In C. S. P. Chilton (Ed.), *Politics as text and talk* (pp. 33-57). Klaprozenweg: Benjamins. <https://discourses.org/wp-content/uploads/2022/07/Teun-A.-van-Dijk-2002-Political-discourse-and-political-cognition.pdf>. Diakses pada 8 Nov 2025.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, H.E. Hamilton, & D. Schiffrrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (pp. 466-485). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22>